PERILAKU POLITIK MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH ETNIS MINORITAS (STUDI KASUS DI KOTA BATAM TAHUN 2024)

Juan Aldo Pratama
NPP. 33.0714
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: juanaldo747@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Baharuddin Thahir, S.Sos., M.Si.
Email: baharthahir6@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The relationship between ethnic identity and rational considerations in voting behavior remains contested in Indonesian democratic studies. While the 2017 Jakarta gubernatorial election demonstrated how identity mobilization can override candidate qualifications, Batam City's 2024 Regional Election presented a contrasting phenomenon: Li Claudia Chandra, a Chinese-ethnic candidate representing a minority group, won the Deputy Mayor position in a city where the Malay ethnic group constitutes the largest population at 26.78%. No study has specifically explained why a minority candidate could win in a highly heterogeneous Indonesian city such as Batam.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the political behavior of Batam City's multiethnic community in the 2024 Regional Election (Pilkada) and to identify factors influencing community acceptance of a candidate from an ethnic minority group.* ***Method:*** *A descriptive qualitative approach with a case study method was employed. Data were collected through semi-structured interviews with 4 KPU commissioners and 1 Kesbangpol official (purposive sampling), and 8 community members (snowball sampling), supplemented by open questionnaires and documentation. Data saturation was reached after the 11th interview, with the remaining two serving as confirmatory rounds. Data analysis followed the Miles and Huberman interactive model comprising data reduction, data display, and conclusion drawing.* ***Result:*** *Community political behavior in Batam is characterized by evaluative-rational inclusivity: voting choices are based on verifiable track records and candidate performance, not ethnic identity, and expressed openly and articulately. Acceptance of the minority candidate was shaped by five mutually reinforcing factors: high educational attainment reflected by a Human Development Index (HDI) exceeding 80, long-standing multiethnic coexistence, Li Claudia's adequate track record and competence, consistent civic education by KPU and Kesbangpol, and the facilitative role of religious and customary community leaders as value facilitators.* ***Conclusion:*** *Political behavior in Batam has moved beyond primordialism toward evaluative political behavior. Li Claudia's ethnic identity proved electorally neutral neither a significant barrier nor a decisive electoral advantage reflecting the maturity of civic culture in Batam City's multiethnic society.*

Keywords: *Civic Culture; Ethnic Minority; Political Behavior; Rationality-Affect Integration; Regional Election*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap*): Hubungan antara identitas etnis dan pertimbangan rasional dalam perilaku memilih masih menjadi perdebatan dalam kajian demokrasi Indonesia. Berbeda dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang memperlihatkan bagaimana mobilisasi identitas mampu menggeser pertimbangan kompetensi, Pilkada Kota Batam 2024 menghadirkan fenomena kontras: Li Claudia Chandra dari etnis Tionghoa berhasil memenangkan posisi Wakil Wali Kota di kota dengan mayoritas etnis Melayu (26,78%). Belum ada penelitian yang secara spesifik menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat sehingga kandidat dari etnis minoritas dapat menang di kota yang sangat heterogen seperti Kota Batam. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis perilaku politik masyarakat Kota Batam dalam Pilkada 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kandidat dari etnis minoritas. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur kepada 4 komisioner KPU dan 1 pejabat Kesbangpol Kota Batam (*purposive sampling*) serta 8 masyarakat pemilih (*snowball sampling*), dilengkapi kuesioner terbuka dan dokumentasi. Saturasi data dicapai setelah wawancara ke-11, dengan dua wawancara terakhir berfungsi sebagai konfirmasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. **Hasil/Temuan:** Perilaku politik masyarakat Kota Batam bercirikan evaluatif rasional inklusif pilihan ditentukan berdasarkan rekam jejak dan kinerja kandidat yang dapat diverifikasi, bukan kesamaan identitas etnis, dan dinyatakan secara terbuka. Penerimaan terhadap kandidat minoritas didorong oleh lima faktor yang saling memperkuat: tingginya tingkat pendidikan masyarakat (IPM melampaui 80), pengalaman panjang hidup dalam kemajemukan etnis, rekam jejak dan kapabilitas Li Claudia yang memadai, program pendidikan politik yang konsisten dari KPU dan Kesbangpol, serta peran tokoh agama dan adat sebagai fasilitator nilai inklusivitas. **Kesimpulan:** Perilaku memilih masyarakat Batam bersifat evaluatif dan rasional inklusif. Identitas etnis Li Claudia terbukti bersifat netral secara elektoral, tidak menjadi hambatan berarti maupun keuntungan yang menentukan, mencerminkan kematangan *civic culture* masyarakat Kota Batam yang multietnis.

Kata kunci: *Civic Culture*; Etnis Minoritas; Perilaku Politik; Pilkada; *Rationality-Affect Integration*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen demokrasi yang memungkinkan rakyat menentukan pemimpinnya secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Perilaku politik dipahami sebagai pola partisipasi, orientasi, sikap, dan tindakan politik individu atau kelompok dalam merespons struktur dan proses politik, termasuk preferensi pemilih, tingkat partisipasi, serta faktor sosiokultural dan rasional yang memengaruhi keputusan politik (Hara hap, 2016). Budiardjo (2008) menegaskan bahwa perilaku politik merupakan tindakan atau respons yang ditunjukkan individu maupun kelompok dalam rangka memengaruhi dan merespons kebijakan serta sistem politik, termasuk di dalamnya partisipasi dalam pemilihan umum.

Dalam praktik demokrasi Indonesia, perilaku politik tidak dapat dilepaskan dari berbagai orientasi identitas agama, gender, suku, budaya, dan adat istiadat yang kerap dimanfaatkan sebagai alat dalam kontestasi elektoral, bahkan berpotensi mengancam kualitas demokratisasi itu sendiri (Aspinall, 2011; Astuti et al., 2023). Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi contoh nyata bahwa sentimen keagamaan dapat menggeser pertimbangan kompetensi kandidat dan mempertajam polarisasi sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok etnis

minoritas di Indonesia masih rentan mengalami penyingkiran yang bersifat sistematis dalam arena politik, sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus diskriminasi yang terus terjadi (Ghozali et al., 2024).

Secara yuridis, hak setiap warga negara untuk mencalonkan diri dan dipilih tanpa diskriminasi telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara konseptual, Pilkada merupakan instrumen penting bagi penguatan demokrasi lokal dalam bingkai pemerintahan daerah yang akuntabel dan berpusat pada kepentingan rakyat (Santoso, 2020). Namun, jaminan yuridis tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku elektoral masyarakat di lapangan (Citrayanti & Yuhertiana, 2021).

Kota Batam, sebagai kota industri di Provinsi Kepulauan Riau yang tumbuh pesat dalam kerangka desentralisasi pemerintahan daerah (Arif & Mulyana, 2020), memperlihatkan kondisi yang berbeda dari kecenderungan umum tersebut. Komposisi etnisnya sangat beragam: Melayu (26,78%), Jawa (17,61%), Batak (14,97%), Minangkabau (14,93%), dan Tionghoa (6,28%), dengan mayoritas penduduk merupakan pendatang dari berbagai penjuru nusantara yang membentuk karakter multikultural kota ini (BPS Kota Batam, 2025). Pada Pilkada 27 November 2024, pasangan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra memenangkan suara terbanyak di seluruh 12 kecamatan, mengalahkan pasangan Nuryanto dan Hardi yang keduanya berasal dari kelompok etnis mayoritas (KPU Kota Batam, 2024).

Fenomena keterpilihan Li Claudia Chandra dari etnis Tionghoa sebagai Wakil Wali Kota Batam menjadi objek analisis yang signifikan, mengingat kepala daerah di Indonesia umumnya berasal dari kelompok etnis mayoritas di daerahnya. Tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam yang melampaui angka 80 mengindikasikan bahwa kapasitas pendidikan masyarakat turut membentuk pola perilaku politik yang lebih rasional dan inklusif (Pratiwi et al., 2025). Pola ini memunculkan pertanyaan empiris: bagaimana masyarakat multietnis Kota Batam bersikap secara politik dalam kontestasi elektoral yang melibatkan kandidat dari kelompok etnis minoritas, dan faktor apa saja yang mendorong penerimaan tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Berdasarkan pemetaan literatur menggunakan VOSViewer, penelitian tentang perilaku politik masyarakat telah banyak dilakukan di Indonesia. Namun, sebagian besar penelitian mengkaji perilaku politik dalam konteks di mana identitas memperkuat polarisasi atau mendorong pilihan berbasis primordialisme, termasuk melalui mobilisasi identitas yang berpotensi mengancam nilai pluralisme dalam demokrasi lokal (Mietzner & Muhtadi, 2020). Belum ada penelitian yang secara spesifik menjelaskan kondisi sebaliknya yakni ketika masyarakat multietnis di Indonesia justru mampu menerima dan memilih kandidat dari kelompok etnis minoritas secara terbuka, berbasis kinerja, dan bukan karena solidaritas identitas.

Kesenjangan yang diambil penulis adalah ketiadaan studi yang mengkaji dinamika integrasi rasionalitas dan afeksi pemilih (Panagopoulos & Wang, 2025) dalam konteks Pilkada inklusif di kota industri multietnis Indonesia, khususnya yang menjelaskan faktor-faktor struktural dan kultural yang menjadikan identitas etnis bersifat netral secara elektoral. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui studi kasus Pilkada Kota Batam 2024.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting secara akademis untuk memberikan kontribusi empiris pada studi *civic culture* (Almond & Verba, 1989) dalam konteks Indonesia, khususnya tentang

kematangan budaya politik masyarakat perkotaan multietnis. Tanpa penelitian ini, mekanisme psikologis dan sosial yang memungkinkan terwujudnya inklusi elektoral di Indonesia akan tetap tidak terpetakan, dan studi perilaku politik akan terus didominasi oleh perspektif primordialisme.

Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi KPU dan Kesbangpol Kota Batam dalam merumuskan strategi pendidikan politik yang lebih inklusif dan berbasis bukti. Bagi pemerintah daerah lain di Indonesia yang bercita-cita memperkuat representasi kelompok minoritas, penelitian ini menyediakan bukti empiris yang dapat dijadikan acuan kebijakan untuk memelihara dan memperkuat kondisi sosial yang kondusif bagi demokrasi inklusif. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris dalam memahami pola perilaku politik yang inklusif, sehingga program penguatan demokrasi berisiko tidak tepat sasaran.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa kajian terdahulu yang relevan. Nasution dkk. (2024) meneliti pengaruh identitas etnis terhadap perilaku pemilih pada Pilwalkot Medan 2020 menggunakan metode kuantitatif. Temuan mereka menunjukkan bahwa identitas etnis masih berpengaruh di kawasan homogen secara sosial, namun di kawasan perkotaan yang lebih majemuk masyarakat mulai mempertimbangkan faktor rasional seperti kompetensi dan rekam jejak kandidat. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji perilaku politik masyarakat kota heterogen, namun penelitian Nasution dkk. berfokus pada identitas sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini menjelaskan penerimaan inklusif terhadap kandidat minoritas. Keterbatasan penelitian Nasution dkk. terletak pada pendekatannya yang kuantitatif, sehingga tidak mampu mengungkap mekanisme psikologis dan sosial yang menjelaskan bagaimana dan mengapa identitas etnis dapat menjadi netral secara elektoral dalam konteks spesifik.

Fautanu dkk. (2020) mengkaji politik identitas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 secara kualitatif melalui perspektif pemikiran Nurcholish Madjid. Mereka menemukan bahwa isu agama dimanfaatkan untuk membangun solidaritas mayoritas, meskipun juga mencatat munculnya pemilih perkotaan terdidik yang menolak politik identitas. Berbeda dengan temuan tersebut, penelitian penulis menunjukkan bahwa di Batam, dominasi rasionalitas berbasis kinerja justru menjadi penentu utama pilihan masyarakat, bukan sentimen identitas. Keterbatasan penelitian Fautanu dkk. adalah konteksnya yang sangat khas Pilkada Jakarta 2017 dengan polarisasi identitas yang sudah ekstrinsik sehingga tidak dapat digeneralisasi ke konteks kota multietnis yang justru menampilkan harmoni elektoral.

Sumaya (2020) menganalisis konflik etnis di Kalimantan Barat menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa identitas etnis menjadi faktor dominan pilihan politik akibat sejarah konflik yang mendalam. Penelitian Sumaya hanya menggambarkan kondisi ketika identitas memicu konflik, sementara penelitian ini mengisi kesenjangan dengan menjelaskan kondisi berlawanan ketika masyarakat multietnis melampaui batas-batas primordial dan memilih berdasarkan evaluasi kinerja. Keterbatasan penelitian Sumaya adalah ketiadaan analisis mengenai faktor-faktor yang memungkinkan masyarakat melampaui identitas dalam pilihan politiknya justru kesenjangan yang paling relevan untuk konteks inklusif seperti Batam.

Istianah dan Saehudin (2023) menggunakan *mixed method* untuk mengkaji pengaruh tokoh agama (kiai) terhadap perilaku politik masyarakat perkotaan di Sukabumi menjelang Pemilu 2024. Temuan mereka menunjukkan pengaruh kiai masih signifikan dalam pembentukan opini, meskipun sebagian masyarakat perkotaan mulai menunjukkan kemandirian politik. Berbeda dengan penelitian tersebut, penulis menemukan bahwa tokoh agama dan adat

di Batam berperan sebagai fasilitator nilai inklusif, bukan pembentuk loyalitas identitas. Keterbatasan penelitian ini adalah konteks Sukabumi yang relatif homogen secara etnis dan budaya, berbeda dengan Batam sebagai kota industri migran dengan heterogenitas yang jauh lebih tinggi.

Studi internasional oleh Ghaem-Maghami dan Kuuire (2022) melakukan *systematic review* dan *meta-analysis* terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keterpilihan kandidat minoritas dalam pemerintahan lokal di negara maju. Temuan mereka menunjukkan bahwa keberhasilan kandidat minoritas sangat dipengaruhi oleh integrasi sosial, jejaring komunitas, dan koalisi lintas-etnis berbasis kompetensi. Penelitian ini memiliki relevansi komparatif namun belum mengkaji konteks Indonesia; penelitian penulis mengisi *gap* tersebut dengan menyediakan bukti empiris dari kota industri multietnis di negara berkembang. Keterbatasan penelitian Ghaem-Maghami dan Kuuire terletak pada konteks negara maju yang memiliki karakteristik demokrasi, kapasitas kelembagaan, dan kondisi sosial yang berbeda secara substansial dengan Indonesia sebagai negara berkembang dengan sejarah konflik identitas yang lebih intens.

Secara keseluruhan, terdapat beberapa kesenjangan kolektif yang menggarisbawahi kebutuhan penelitian ini. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu mengkaji perilaku politik dalam konteks konflik atau polarisasi identitas, bukan dalam konteks harmoni elektoral di mana identitas menjadi netral. Kedua, tidak ada penelitian yang secara bersamaan mengintegrasikan perspektif pemilih, lembaga penyelenggara, dan tokoh komunitas dalam satu studi kasus Pilkada multietnis yang inklusif di Indonesia. Ketiga, belum ada penelitian yang mengaplikasikan Teori *Rationality-Affect Integration* (Panagopoulos & Wang, 2025) yang baru diterbitkan pada 2025 untuk menjelaskan perilaku pemilih dalam konteks Pilkada Indonesia. Kesenjangan-kesenjangan ini secara kolektif menunjukkan perlunya penelitian yang secara spesifik mengkaji mekanisme penerimaan inklusif terhadap kandidat etnis minoritas di kota industri multietnis Indonesia, yang menjadi kontribusi utama penelitian ini.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari kajian terdahulu dalam tiga aspek utama. Pertama, dari segi objek penelitian: penelitian ini mengkaji fenomena yang baru dan spesifik dalam konteks Indonesia, yaitu kemenangan kandidat dari etnis minoritas di kota multietnis, yang merupakan kebalikan dari fenomena dominan yang dikaji sebelumnya. Kedua, dari segi teori: penelitian ini memadukan Teori *Civic Culture* (Almond & Verba, 1989) dengan Teori *Rationality-Affect Integration* (Panagopoulos & Wang, 2025), sebuah teori yang baru diterbitkan pada 2025 dan belum pernah diaplikasikan dalam studi perilaku politik Indonesia. Perpaduan ini memberikan perspektif makro-kultural sekaligus mikro-psikologis secara bersamaan. Ketiga, dari segi metode: penelitian ini menggunakan informan institusional kunci (KPU dan Kesbangpol) yang memiliki data empiris langsung tentang penyelenggaraan Pilkada, yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya melibatkan masyarakat atau elite politik saja.

Kontribusi ilmiah penelitian ini dapat dijabarkan lebih spesifik sebagai berikut. Teori *Civic Culture* Almond dan Verba (1989) memungkinkan analisis pada level makro-kultural, yaitu bagaimana budaya politik inklusif Kota Batam yang terbentuk dari sejarah panjang kemigrasian dan kemajemukan etnis menciptakan kondisi struktural yang kondusif bagi penerimaan kandidat minoritas, termasuk terbentuknya orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif masyarakat yang bersifat lintas-identitas. Sementara itu, Teori *Rationality-Affect Integration* Panagopoulos dan Wang (2025) memungkinkan analisis pada level mikro-psikologis, yaitu bagaimana individu pemilih secara konkret mengintegrasikan pertimbangan rasional berbasis kinerja kandidat dengan respons afektif berbasis kepercayaan institusional, sehingga identitas etnis menjadi faktor yang tidak relevan dalam keputusan akhir memilih. Perpaduan kedua teori

ini menghasilkan model analitik dua level, makro-kultural dan mikro-psikologis yang belum pernah diterapkan dalam studi perilaku politik elektoral di Indonesia, dan secara khusus mampu menjelaskan fenomena keberhasilan kandidat etnis minoritas di konteks kota industri migran multietnis seperti Batam.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perilaku politik masyarakat Kota Batam dalam Pemilihan Kepala Daerah dari etnis minoritas melalui studi kasus Pilkada Kota Batam Tahun 2024.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam makna, proses, dan dinamika perilaku politik masyarakat yang tidak dapat direduksi menjadi data numerik (Sugiyono, 2022; Tomsa, 2020). Metode studi kasus digunakan mengingat fenomena kemenangan kandidat dari etnis minoritas dalam Pilkada Kota Batam 2024 merupakan kasus spesifik yang memerlukan analisis mendalam dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yang dimulai dari pengamatan empiris di lapangan, dianalisis hingga menghasilkan kesimpulan yang lebih abstrak dan dapat dikaitkan dengan teori yang relevan (Harahap, 2020).

Penelitian dilaksanakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selama bulan Januari hingga April 2026. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semiterstruktur dan kuesioner terbuka, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa data resmi KPU dan Kesbangpol Kota Batam, hasil rekapitulasi suara, profil kependudukan dari BPS, serta literatur akademik yang relevan.

Penentuan informan menggunakan dua teknik sesuai karakteristik kelompok informan (Sugiyono, 2022; Simangunsong, 2017). *Purposive sampling* digunakan untuk memilih 4 komisioner KPU Kota Batam dan 1 Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam sebagai informan kunci, mengingat kedua lembaga ini memiliki data dan perspektif langsung mengenai penyelenggaraan Pilkada serta dinamika politik identitas masyarakat. Ketua KPU Kota Batam ditetapkan sebagai informan kunci utama karena memiliki kewenangan teknis penyelenggaraan dan data komprehensif tentang pola partisipasi pemilih. *Snowball sampling* digunakan untuk memilih 8 informan dari kalangan masyarakat pemilih Kota Batam yang berasal dari lima latar belakang etnis berbeda Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau, dan Tionghoa untuk memastikan keragaman perspektif dalam data.

Penetapan jumlah 8 informan masyarakat didasarkan pada prinsip *data saturation* (kejenuhan data) yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif. Secara operasional, saturasi dicapai ketika wawancara lanjutan tidak lagi menghasilkan kategori atau tema baru yang substansial bagi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, saturasi dicapai setelah wawancara ke-11 dari total 13 informan yaitu setelah 5 informan institusional dan 6 informan masyarakat diwawancarai ketika seluruh informan secara konsisten mengemukakan tema-tema serupa: evaluasi berbasis rekam jejak kandidat, kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara, dan identitas supraetnis sebagai 'warga Batam'. Dua wawancara terakhir (informan masyarakat ke-7 dan ke-8) dilakukan sebagai konfirmasi saturasi dan tidak menghasilkan kategori baru yang mengubah pola analisis. Keragaman latar belakang etnis informan memastikan bahwa saturasi dicapai bukan karena homogenitas sampel, melainkan karena konsistensi pola yang sesungguhnya bersifat lintas-kelompok.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari KPU, Kesbangpol, dan masyarakat serta triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, kuesioner terbuka, dan dokumentasi. *Member check* juga dilakukan kepada informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi data dengan kondisi sebenarnya. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap: (1) reduksi data, memilih dan memfokuskan informasi yang relevan; (2) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi yang dilakukan secara sistematis dan berulang hingga data menjadi jenuh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perilaku Politik Masyarakat Kota Batam dalam Pilkada 2024

Penulis menganalisis perilaku politik masyarakat menggunakan Teori *Civic Culture* (Almond & Verba, 1989) yang mencakup orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif, serta Teori *Rationality-Affect Integration* (Panagopoulos & Wang, 2025) yang mengurai dimensi rasionalitas, afeksi, dan integrasinya. Temuan menunjukkan bahwa secara keseluruhan perilaku politik masyarakat Kota Batam bercirikan evaluatif rasional inklusif.

Dari sisi orientasi kognitif, masyarakat Kota Batam memiliki pengetahuan yang memadai mengenai mekanisme teknis Pilkada. Ketua KPU menegaskan bahwa proses dan mekanisme Pilkada sudah cukup dipahami masyarakat, dengan struktur penyelenggaraan yang menjangkau hingga tingkat RT/RW (wawancara Mawardi, 15 Januari 2026). Akses informasi tentang kandidat didominasi oleh platform digital, meskipun KPU mencatat adanya fenomena kejenuhan informasi di kalangan sebagian masyarakat yang tidak lagi terdorong mencari informasi substantif secara mendalam. Dalam kerangka *civic culture*, kejenuhan informasi ini merupakan tantangan bagi kualitas orientasi kognitif yang diperlukan bagi perilaku memilih yang evaluatif.

Orientasi afektif menunjukkan pola yang konsisten: kepercayaan institusional terhadap KPU berada pada level positif, dan ikatan emosional terhadap kandidat terbentuk melalui rekam jejak bukan kesamaan identitas etnis. Ketua KPU menyatakan bahwa selama Pilkada berlangsung tidak ada isu maupun pelanggaran yang mencoreng pelaksanaannya, dan bahwa kepercayaan masyarakatlah yang mendorong partisipasi, bukan sebaliknya (wawancara Mawardi, 2026). Informan dari berbagai latar belakang etnis secara konsisten menyatakan kedekatan emosional dengan pasangan calon dibangun berdasarkan konsistensi kinerja yang dapat dirasakan langsung, bukan kesamaan asal daerah atau identitas etnis. Temuan ini mengkonfirmasi dimensi afektif dalam Teori *Rationality-Affect Integration*—bahwa afeksi pemilih Batam berakar pada kepercayaan berbasis bukti (*evidence-based trust*), bukan solidaritas primordial.

Orientasi evaluatif masyarakat mencerminkan kemampuan menilai kinerja pemerintahan yang ada sebagai dasar keterlibatan politik. Kepala Kesbangpol menyatakan bahwa kinerja pemerintahan sebelumnya, yang mencakup pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan stabilitas ekonomi, menjadi faktor determinan preferensi pemilih (wawancara Kepala Kesbangpol, 2026). Pola ini termanifestasi dalam kecenderungan *retrospective voting* memilih berdasarkan evaluasi kinerja masa lalu yang telah dirasakan manfaatnya secara langsung. Tidak adanya konflik sosial pascapenetapan hasil mengindikasikan penerimaan masyarakat atas proses Pilkada sebagai mekanisme yang sah berdasarkan penilaian yang adil, bukan sekadar penerimaan pasif.

Dari sisi rasionalitas, pertimbangan program dan rekam jejak mendominasi pengambilan keputusan dengan pola *candidate-centered voting* yang lebih dominan dari *party-line voting*. Ketua KPU mengamati bahwa yang paling dominan memengaruhi pilihan

masyarakat adalah kualitas kandidat, bukan asal-usul etnisnya (wawancara Mawardi, 2026). Pola *risk-averse voting* memilih stabilitas yang sudah dikenal dibandingkan perubahan yang belum terverifikasi teridentifikasi pada pemilih yang mendasarkan pilihannya pada rekam jejak nyata yang dapat dirasakan. Faktor ekonomi turut menjadi pertimbangan rasional yang signifikan, mengingat Batam sebagai kota industri menjadikan kepemimpinan daerah berdampak langsung pada iklim bisnis dan ketenagakerjaan.

Pada tataran integrasi rasional-afektif, konsistensi kemenangan petahana selama tiga periode berturut-turut (2015, 2020, 2024) menjadi bukti empiris paling kuat dari *path-dependent voting* yang dihasilkan oleh keselarasan logika dan emosi. Ketua KPU menegaskan bahwa masyarakat Kota Batam sudah mulai dewasa dalam berdemokrasi pilihan lebih dominan berbasis program kerja, dan meskipun politik identitas mungkin ada secara personal, tidak tampak ke permukaan selama Pilkada (wawancara Mawardi, 2026). Pilihan yang dihasilkan bersifat terbuka dan dapat diargumentasikan secara publik ciri khas integrasi rasional-afektif yang matang sebagai penanda kematangan demokrasi lokal (Wahyuningsih, 2021).

3.2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan Masyarakat terhadap Kandidat Etnis Minoritas

Penerimaan masyarakat terhadap Li Claudia Chandra sebagai kandidat dari etnis minoritas merupakan hasil pertemuan lima kondisi yang saling mendukung dan memperkuat.

Pertama, tingginya tingkat pendidikan masyarakat. IPM Kota Batam yang melampaui angka 80 mencerminkan kapasitas analitis kolektif dalam mengevaluasi kandidat secara substantif. Ketua KPU menyatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kota Batam yang memadai membuat mereka memahami berbagai aspek yang dapat merusak kualitas demokratis sebuah Pilkada, dengan kandidat itu sendiri bukan asal-usulnya yang paling dominan memengaruhi pilihan (wawancara Mawardi, 2026). Secara teoritis, masyarakat yang lebih terdidik memiliki kemampuan lebih besar untuk memisahkan pertimbangan substantif dari pertimbangan berbasis identitas (Pratiwi et al., 2025). Dalam kerangka *civic culture,* IPM yang tinggi berkorelasi dengan orientasi evaluatif yang lebih dominan dalam sistem budaya politik masyarakat.

Kedua, pengalaman panjang hidup dalam kemajemukan. Sebagai kota migrasi, Batam telah dihuni pendatang dari berbagai penjuru nusantara selama puluhan tahun, membangun modal sosial lintas kelompok yang kokoh. Seorang informan mengungkapkan bahwa identitas bersama sebagai 'warga Batam' yang terbentuk dari pengalaman hidup berdampingan, bukan kesamaan suku menjadi nilai yang lebih kuat dari ikatan primordial (kuesioner Riski, 2026). Identitas supraetnis sebagai 'warga Batam' berfungsi sebagai perekat sipil yang mendukung penerimaan inklusif, melampaui ikatan etnis sempit. Secara teoritis, ini merepresentasikan pembentukan *civil culture* yang organik melalui pengalaman kemajemukan jangka panjang.

Ketiga, rekam jejak dan kapabilitas Li Claudia. Kepala Kesbangpol menyatakan bahwa pasangan Amsakar–Li Claudia memiliki rekam jejak yang baik, pengalaman pemerintahan, kedekatan dengan masyarakat Batam, dan visi misi yang dinilai realistis dengan orientasi pada pembangunan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan (wawancara Kepala Kesbangpol, 2026). Signifikansinya, bahkan pemilih dari etnis Tionghoa pun mendasarkan pilihan pada evaluasi kemampuan dan rekam jejak, bukan solidaritas etnis sebagaimana dinyatakan seorang informan: meskipun ada kebanggaan personal melihat kandidat dari etnisnya sendiri maju, hal itu tidak membutakan evaluasi kinerja (kuesioner Darwin, 2026). Temuan ini mengkonfirmasi bahwa penerimaan bersifat spesifik terhadap kandidat ini, bukan generik terhadap 'kandidat Tionghoa' sebuah distinasi penting dalam analisis perilaku pemilih multietnis.

Keempat, program pendidikan politik KPU dan Kesbangpol. Koordinasi erat antara KPU dan Kesbangpol menciptakan ekosistem kelembagaan yang terpadu dalam

mempromosikan norma inklusivitas secara konsisten. Kepala Kesbangpol menjelaskan bahwa peran aktif Kesbangpol mencakup pendidikan politik, sosialisasi, peningkatan partisipasi pemilih, penguatan wawasan kebangsaan dan toleransi, pencegahan konflik sosial dan politik, serta fasilitasi komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan partai politik (wawancara Kepala Kesbangpol, 2026). Program-program ini secara kumulatif membangun budaya memilih berbasis substansi, bukan identitas.

Kelima, peran tokoh agama dan adat sebagai fasilitator nilai. Berbeda dari penelitian Istianah dan Saehudin (2023) yang menemukan tokoh agama sebagai pembentuk loyalitas identitas, di Batam tokoh-tokoh komunitas berperan sebagai kanal afektif dalam integrasi rasional-afeksi pemilih. Kepercayaan terhadap tokoh komunitas ditransfer menjadi kepercayaan terhadap norma inklusif yang mereka sampaikan, memperkuat legitimasi pilihan berbasis kinerja di mata masyarakat luas. Peran ini sejalan dengan mekanisme *affective cue-taking* dalam Teori *Rationality-Affect Integration*, di mana kepercayaan afektif terhadap pemimpin komunitas memperkuat bukan mengalihkan orientasi evaluatif pemilih.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi sebagian sekaligus berkontradiksi dengan penelitian terdahulu. Sejalan dengan temuan Nasution dkk. (2024) bahwa masyarakat urban multietnis bergerak menuju orientasi rasional berbasis kompetensi, penelitian ini memperkuat bahwa pergeseran tersebut telah terwujud secara penuh di Kota Batam hingga mampu melampaui batas identitas etnis dalam kontestasi kepala daerah. Temuan ini memperkuat pula kesimpulan Mujani dkk. (2018) bahwa pengaruh identitas cenderung melemah di wilayah urban yang plural.

Berbeda dengan temuan Fautanu dkk. (2020) yang menemukan identitas sebagai pemantik segregasi dan polarisasi, serta Sumaya (2020) yang menemukan identitas sebagai prediktor utama pilihan politik berbasis konflik, penelitian ini menemukan fenomena yang berlawanan: identitas etnis bersifat netral secara elektoral ketika *civic culture* yang matang telah terbentuk melalui pengalaman kemajemukan yang panjang. Temuan ini berkonfirmasi dengan kajian internasional Ghaem-Maghami dan Kuuire (2022) bahwa keberhasilan kandidat minoritas terjadi ketika mereka dianggap memberikan manfaat berdasarkan kompetensi, bukan semata solidaritas identitas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemberian bukti empiris pertama dari konteks Indonesia bahwa kondisi serupa dapat terwujud melalui mekanisme integrasi sosial dan budaya politik inklusif yang khas kota industri migran, memperkaya literatur internasional dengan perspektif negara berkembang (Pratiwi et al., 2025). Dalam kerangka desentralisasi Indonesia, keterbukaan politik semacam ini sekaligus mencerminkan dampak positif otonomi daerah terhadap dinamika politik lokal yang semakin inklusif dan dewasa (Santoso et al., 2023).

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan beberapa temuan menarik yang layak untuk dibahas lebih lanjut dan dikaitkan dengan pengembangan teori perilaku politik, demokrasi lokal, maupun studi pemilih multietnis di Indonesia.

Pertama, pola kemenangan petahana yang terkonfirmasi selama tiga periode berturut-turut (2015, 2020, 2024) mencerminkan fenomena *path-dependent voting* yang didasarkan pada akumulasi pengalaman positif, bukan loyalitas buta. Dari perspektif teori perilaku politik, temuan ini memberikan bukti empiris bagi konsep loyalitas pemilih berbasis kinerja yang bersumber dari pengalaman nyata (*experiential loyalty*), berbeda dari loyalitas berbasis identitas atau partai yang mendominasi literatur perilaku politik Indonesia (Mujani et al., 2018). *Path-dependent voting* semacam ini mengindikasikan bahwa demokrasi lokal yang matang

mampu menciptakan pola akuntabilitas elektoral berbasis *retrospective voting* yang stabil sebuah karakteristik demokrasi yang diinginkan yang jarang terdokumentasi dalam kasus Indonesia. Fenomena ini sekaligus mengimplikasikan bahwa stabilitas demokrasi elektoral di Batam tidak hanya bergantung pada prosedur formal, tetapi pada kualitas pengalaman nyata yang dirasakan pemilih dari periode ke periode.

Kedua, absennya laporan *money politics* dari seluruh informan dan responden kuesioner merupakan temuan yang signifikan secara teoritis. Ketua KPU menegaskan bahwa tidak ada laporan pelanggaran kode etik maupun pidana pemilu, dan bahwa Pilkada Batam berjalan adil dan demokratis tanpa adanya laporan pemilih dipaksa memilih calon tertentu (wawancara Mawardi, 2026). Kondisi ini meskipun perlu dikonfirmasi melalui penelitian lanjutan yang lebih spesifik mengisyaratkan proposisi teoritis penting: dalam konteks masyarakat dengan *civic culture* yang matang, motivasi transaksional cenderung tergantikan oleh motivasi substantif berbasis evaluasi kinerja pemerintahan. Proposisi ini relevan bagi pengembangan teori pemilih rasional dalam studi demokrasi lokal Indonesia, yang selama ini terlalu sering mengasosiasikan pilihan berbasis afeksi dengan *money politics* (Siregar & Maryanah, 2022), padahal temuan Batam menunjukkan bahwa afeksi dapat dibangun secara organik dari kepercayaan berbasis rekam jejak.

Ketiga, kesenjangan digital antara wilayah *mainland* dan *hinterland* turut memengaruhi kualitas akses informasi politik, yang berimplikasi pada perbedaan kedalaman pertimbangan pemilih di dua wilayah yang berbeda karakteristik tersebut. Dalam studi pemilih multietnis di Indonesia, temuan ini menambahkan dimensi baru: inklusivitas elektoral tidak hanya membutuhkan budaya politik yang matang, tetapi juga pemerataan akses informasi sebagai prasyarat epistemis partisipasi yang berkualitas. Kesenjangan digital ini dapat menjadi variabel moderasi yang perlu diperhatikan dalam studi perilaku pemilih di kota-kota industri multietnis yang memiliki heterogenitas infrastruktur serupa. Implikasinya bagi pengembangan teori demokrasi lokal adalah bahwa kematangan *civic culture* tidak serta merta merata di seluruh wilayah suatu kota distribusi spasial kualitas demokrasi elektoral perlu menjadi perhatian dalam penelitian selanjutnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, perilaku politik masyarakat Kota Batam dalam Pilkada 2024 bercirikan evaluatif rasional inklusif. Masyarakat menentukan pilihan berdasarkan rekam jejak dan kinerja kandidat yang dapat diverifikasi secara langsung, bukan berdasarkan kesamaan identitas etnis atau afiliasi kelompok. Dukungan terhadap pasangan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra bersifat terbuka dan dapat diargumentasikan, bukan pilihan tersembunyi yang dipandu solidaritas primordial. Kecenderungan *retrospective voting* yang terkonfirmasi dalam tiga periode berturut-turut mencerminkan kematangan *civic culture* yang mengintegrasikan rasionalitas dan afeksi berbasis pengalaman.

Kedua, penerimaan masyarakat terhadap Li Claudia Chandra sebagai kandidat dari etnis minoritas merupakan hasil pertemuan lima kondisi yang saling mendukung: tingginya tingkat pendidikan masyarakat (IPM >80), pengalaman panjang hidup dalam kemajemukan etnis yang membangun identitas supraetnis sebagai 'warga Batam', rekam jejak dan kapabilitas Li Claudia yang dinilai memadai secara lintas latar belakang, program pendidikan politik yang konsisten dari KPU dan Kesbangpol, serta peran tokoh agama dan adat sebagai fasilitator nilai inklusivitas. Faktor etnis Li Claudia terbukti bersifat netral secara elektoral tidak menjadi hambatan yang berarti, tetapi juga bukan daya tarik utama sehingga fenomena Batam 2024 merupakan tolok ukur penting kualitas demokrasi lokal yang inklusif di Indonesia.

Berdasarkan temuan penelitian ini, diajukan rekomendasi praktis yang spesifik kepada sejumlah pemangku kepentingan. Bagi KPU Kota Batam dan KPU RI, pengalaman Batam dalam membangun *civic culture* yang matang perlu didokumentasikan sebagai *best practice* pendidikan pemilih untuk diadaptasi di kota-kota multietnis lain di Indonesia, khususnya melalui modul pendidikan pemilih yang mendorong evaluasi berbasis kinerja kandidat lintas identitas. Bagi Kesbangpol, identitas supraetnis 'warga Batam' yang terbukti berfungsi sebagai perekat sipil perlu diperkuat secara kelembagaan melalui program wawasan kebangsaan yang secara eksplisit merayakan keberhasilan pluralisme sebagai keunggulan kompetitif kota, bukan sekadar toleransi pasif. Bagi pemerintah daerah Kota Batam dan pemerintah daerah lain yang bercita-cita membangun demokrasi inklusif, pemeliharaan IPM yang tinggi melalui investasi pendidikan dan layanan publik berkualitas perlu dijadikan prioritas kebijakan jangka panjang, mengingat temuan penelitian ini menunjukkan korelasinya dengan perilaku pemilih yang lebih rasional dan inklusif. Bagi lembaga pendidikan politik termasuk IPDN dan perguruan tinggi ilmu pemerintahan lainnya kasus Batam dapat dijadikan materi kurikulum studi kasus pemilihan inklusif yang menunjukkan bahwa kohesi sosial dan budaya politik yang matang merupakan modal terpenting bagi keterpilihan kandidat berbasis kompetensi, melampaui sekat-sekat identitas primordial.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu yang relatif singkat sehingga berpotensi tidak menangkap seluruh dinamika perilaku politik masyarakat. Kedua, penelitian hanya dilakukan di satu kota sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Ketiga, penggunaan *snowball sampling* untuk informan masyarakat berpotensi menghasilkan bias seleksi jika kelompok informan awal memiliki karakteristik yang terlalu homogen.

Arah Masa Depan Penelitian. Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, beberapa arah penelitian masa depan yang lebih spesifik dapat dirumuskan. Pertama, studi komparatif antara Kota Batam dengan daerah-daerah yang menunjukkan kecenderungan penolakan kandidat etnis minoritas seperti yang terjadi di beberapa wilayah pada Pilkada 2017 dan 2020 perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi struktural dan kultural minimal yang diperlukan bagi terwujudnya inklusi elektoral, dan untuk menguji apakah model lima faktor yang ditemukan dalam penelitian ini bersifat transferabel ke konteks lain. Kedua, studi longitudinal tentang keberlanjutan *civic culture* inklusif Kota Batam dalam Pilkada mendatang perlu dilakukan untuk menguji apakah pola *path-dependent voting* ini akan bertahan atau berubah seiring pergantian generasi pemilih dan intensifikasi dinamika politik identitas nasional. Ketiga, penelitian tentang perbedaan perilaku pemilih antara wilayah *mainland* dan *hinterland* Kota Batam yang terindikasi dari kesenjangan digital yang ditemukan dalam penelitian ini perlu dikembangkan secara sistematis untuk memahami variasi internal dalam satu kota yang heterogen. Keempat, studi tentang perspektif kandidat minoritas dan tim kampanye dalam menyikapi dan mengelola faktor identitas etnis selama kontestasi elektoral akan melengkapi perspektif pemilih yang menjadi fokus penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pengumpulan data, serta seluruh informan dan responden yang telah meluangkan waktu dan bersedia berbagi pandangannya. Terima kasih kepada Dr. Baharuddin Thahir, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing atas segala bimbingan, arahan, dan motivasinya. Terima kasih pula kepada pimpinan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas dukungan akademis yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Almond, G. A., & Verba, S. (1989). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations.* SAGE Publications.

Arif, M., & Mulyana, M. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara tahun 2018 (studi kasus di Kecamatan Ternate Selatan). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 46*(2), 381–395. https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1406

Aspinall, E. (2011). Democratization and ethnic politics in Indonesia: Nine theses. *Journal of East Asian Studies, 11*(2), 289–319. https://doi.org/10.1017/S1598240800007190

Astuti, D., Agustang, A., & Idrus, I. I. (2023). Politik identitas dalam kontroversi isu di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, 2*(6), 1769–1778. https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.888

BPS Kota Batam. (2025). *Kota Batam dalam angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kota Batam. https://batamkota.bps.go.id/

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Rev. ed.). Gramedia Pustaka Utama.

Citrayanti, S. A., & Yuhertiana, I. (2021). Factors that influence the decision to elect young voters in the 2020 elections. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 47*(2), 143–158. https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.1840

Fautanu, I., Mahyani, B., & Gunawan, H. (2020). Politik identitas dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017: Perspektif pemikiran politik Nurcholish Madjid. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik, 2*(2), 87–112. https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.8146

Ghaem-Maghami, S., & Kuuire, V. Z. (2022). Immigrants serving in local government: A systematic review and meta-analysis of factors affecting candidacy and election. *Urban Affairs Review, 58*(6), 1719–1756. https://doi.org/10.1177/10780874211038500

Ghozali, M., Fikri, A., Khoiruddin, M., & Farida, U. (2024). Perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas: Studi kasus diskriminasi terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya. *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 2*(3), 727–736. https://doi.org/10.70193/cendekia.v2i3.114

Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif* (H. Sazali, Ed.). Wal Ashri Publishing.

Istianah, R., & Saehudin. (2023). Politik identitas dan perilaku politik kiai di Kota Sukabumi menjelang pemilihan umum 2024. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 4*(2), 233–250. https://doi.org/10.46874/tkp.v4i2.876

KPU Kota Batam. (2024). *Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan kepala daerah Kota Batam tahun 2024*. Komisi Pemilihan Umum Kota Batam. https://kota-batam.kpu.go.id/

Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). The myth of pluralism: Nahdlatul Ulama and the politics of religious tolerance in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia, 42*(1), 58–84. https://doi.org/10.1355/cs42-1c

Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2018). *Voting behavior in Indonesia since democratization: Critical Democrats.* Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108377836

Nasution, K., Sirajuddin, A., Siregar, R., & Pane, M. (2024). Pengaruh identitas etnis politik terhadap perilaku pemilih (studi kasus pemilihan walikota dan wakil walikota Medan tahun 2020). *Public Service and Governance Journal, 5*(1), 127–140. https://doi.org/10.56444/psgj.v5i1.1233

Panagopoulos, C., & Wang, C.-H. (2025). Rationality, affect, and vote choice. *Frontiers in Political Science, 7*, Article 1640408. https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1640408

Pratiwi, C. S., Muhammad, H. A., Elsi, S. D., & Suryono, M. V. A. (2025). The influence of education level on voter behaviour in the 2024 presidential and vice-presidential election in Jambi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 22*(1), 185–195. https://doi.org/10.21831/jc.v22i1.1292

Santoso, A. H. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada tahun 2020 di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 49*(1), 1–9. https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3356

Santoso, E. B., Ilham, T., Fadhilah, H. A., & Rahmadanita, A. (2023). Pemilihan kepala desa secara digital di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 48*(2), 159–178. https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.3033

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik, legalistik, empirik dan inovatif.* Alfabeta.

Siregar, M. C., & Maryanah, T. (2022). Fenomena *money politics* dan pembuktian terstruktur sistematis masif (TSM) pada pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 48*(2), 141–158. https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.1461

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Sumaya, F. (2020). Identitas dalam konflik di Kalimantan Barat (sebuah pemetaan konflik). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 2*(2), 86. https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28149

Tomsa, D. (2020). Public opinion polling and post-truth politics in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia, 42*(1), 1–27. https://doi.org/10.1355/cs42-1a

Wahyuningsih, C. (2021). Partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah serentak masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal, 2*(1), 58–66. https://doi.org/10.56444/psgj.v2i01.1966